

PEWILAYAHAN DAN PENYEBARAN INDUSTRI UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

Mardiana¹⁾; Dahlan Tampubolon²⁾

Peneliti pada Pusat Studi Sosial Ekonomi, LPPM Universitas Riau
E-mail : mardiana@lecturer.unri.ac.id

Abstract: *Industrial zoning serves to accelerate the industrialization process which has comparative and competitive advantages and product efficiency by utilizing local raw materials. The purpose of this paper is to analyze the industrial zoning and distribution of the processing industry in Kuantan Singingi Regency. This research uses the development method, which is to provide a more detailed description of the implementation of spatial use related to the RTRW. The zoning is analyzed from the determination of an area, both the base area and other areas. Industrial land use in Kuantan Singingi Regency is divided into 2 (two), namely small industrial areas and large industrial areas. The designation of the industrial area in Kuantan Singingi Regency is 52.56 hectares. The processing industry in constant price GRDP reached 31.28% in 2020 and grew by around 1.19% during 2016 – 2020. The sub-district which has the most industrial companies is Kuantan Tengah and the largest large and medium industrial companies are in Singingi Hilir District. Small industries that may be included in the center of small and medium-sized industries (SIKIM) are the weaving craft industry (Kuansing batik), sago crackers, smoked fish, and processing of palm oil products.*

Keywords: *Zoning, industrial land use, craft industry*

I. PENDAHULUAN

Pembangunan sektor industri di Indonesia merupakan sektor penting sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor industri telah memberikan kontribusi lebih dari 25% terhadap PDB (Produk Domestik Bruto). Di sisi lain, proses industrialisasi yang selama ini dikelola secara konvensional dengan mengandalkan eksploitasi sumber daya alam telah menjadi fenomena global sebagai salah satu penyebab potensial dari berbagai permasalahan lingkungan ekologis (Sujiman, 2016).

Penerapan konsep industri berkelanjutan di Indonesia hingga saat ini belum menunjukkan perkembangan yang signifikan dengan rata-rata berada pada status kurang berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa hasil penelitian dalam sepuluh tahun terakhir antara lain Kodrat (2011) di Medan, Hadiwijoyo (2013) di Cilegon, Susanti (2015) di Semarang, Budiyanto (2015) di Pulogadung Timur dan Cahyanto (2016) di Jababeka Cikarang.

Pewilayahan industri mengacu pada zonasi yang erat kaitannya dengan

berkumpulnya industri bersama-sama dalam berbagai aspek perilaku umum, misalnya, lokasi geografis, sumber inovasi, pemasok bersama dan faktor produksi, dan sebagainya. Pewilayahan industri terkonsentrasi secara geografis, saling ketergantungan antar perusahaan dan sensitif terhadap jarak sumberdaya. Konsep pewilayahan industri menjadi metafora kuat yang digunakan secara umum untuk memandu perencanaan pembangunan industri dan regional.

Di Indonesia, studi khusus yang menggambarkan pewilayahan industri dan karakter industri di dalamnya masih terbatas. Studi yang ada selama ini hanya membandingkan kinerja perusahaan di dalam dan di luar daerah secara umum dan tidak menangkap efek struktur industri lokalnya (Aritenang & Chandramidi, 2020; Sabri et al., 2018; Suharyani & Mahi, 2018; Winardi et al., 2017). Studi empiris terkemuka di Indonesia tentang pengaruh struktur industri lokal adalah Wardani & Yudhistira (2020), Khoirunurrofik (2018), dan Widodo et al. (2014). Namun, studi-

studi ini belum memasukkan karakteristik spesifik wilayah, yaitu lokasi industri di dalam kawasan atau di luar kawasan peruntukan industri.

Kabupaten Kuantan Singingi dipilih menjadi fokus studi untuk menganalisis pewilayahan berdasarkan kondisi eksisting beroperasi pada skala kegiatan. Analisis juga pada sebaran industri yang bervariasi serta kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan pola ruang kegiatan industri di Kabupaten Kuantan Singingi, secara faktual telah berkembang secara simultan antar industri dengan luas sekitar 52,56 hektar. Dari data luas wilayah peruntukan industri perlu kebijakan terkait dengan sektor yang mampu menjadi penggerak utama perekonomian, meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan mampu mengurangi angka kemiskinan sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Tidak seperti studi lainnya, makalah akan mengidentifikasi dimensi pengembangan kawasan untuk industri dan menganalisis tingkat pewilayahan industri di Kabupaten Kuantan Singingi

II. KERANGKA TEORI

Studi tentang efek aglomerasi dalam struktur industri lokal telah dilakukan di banyak negara. Efek positif, negatif, dan tidak signifikan dari eksternalitas spesialisasi (MAR), diversifikasi (Jacobs), dan kompetisi (Porter) ditemukan dalam berbagai penelitian (Knoben et al., 2016; Rigby & Brown, 2015). Begitu juga dengan studi empiris di Indonesia, diantaranya oleh Widodo et al. (2014), Wardani & Yudhistira (2020), dan Khoirunurrofik (2018). Penelitian oleh Antonietti & Cainelli (2011), Li et al. (2012), Badr dkk. (2019) menyimpulkan bahwa spesialisasi dan diversifikasi memiliki dampak positif terhadap kinerja industri. Sementara itu, penelitian Widodo et al. (2014), Galliano dkk. (2015), Cieřlik dkk. (2017), Wardani & Yudhistira (2020) menyimpulkan bahwa hanya spesialisasi yang berpengaruh positif, sedangkan diversifikasi merugikan kinerja industri.

Fafchamps & El Hamine (2017), menggunakan zona geografis aglomerasi di tingkat kecamatan, kota, dan provinsi, menemukan bahwa satu-satunya spesialisasi memiliki dampak positif pada produktivitas industri, sedangkan dampak diversifikasi masih diragukan. Hasil penelitian Fafchamps & El Hamine (2017) sejalan dengan penelitian Wixe (2015), yang menemukan bahwa spesialisasi berpengaruh positif terhadap produktivitas industri.

Minimnya infrastruktur, keterbatasan teknologi, dan informasi yang asimetris menjadi kendala utama pewilayahan industri di negara berkembang. Giannecchi & Taylor (2017) menambahkan bahwa penghindaran risiko dan lingkungan yang tidak ramah investasi sering menyebabkan sektor industri tidak efisien. Pewilayahan industri membantu mengatasi beberapa masalah industri tersebut (UNIDO, 2012). Sebagai sentralisasi kegiatan industri, pewilayah industri menyediakan prasarana yang lebih baik, teknologi dan informasi, akses ke industri dan pasar pendukung limbah.

Selanjutnya pewilayahan industri tertentu dirancang untuk mempromosikan ekspor dengan serangkaian keunggulan spesifik yang dimiliki lokasi. Dengan menciptakan pewilayahan ini, negara-negara mengirimkan sinyal untuk "terbuka untuk bisnis" dan siap untuk memberikan kemudahan pendirian industri di dalam wilayah dan fasilitas infrastruktur yang baik (Zhan & Narula, 2019). Wilayah industri yang sukses pada awalnya harus menjadi alat untuk mempromosikan pengembangan industri daerah (Lee et al., 2017). Lokasi harus sesuai dengan karakteristik daerah, lingkungan, dan kerangka rencana pembangunan (UNIDO, 2012). Daddi dkk. (2015) berpendapat bahwa perlu adanya intervensi dari asosiasi industri dan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan manfaat kawasan peruntukan industri. Selain itu, seiring perluasan kawasan peruntukan industri, industri baru, termasuk

perusahaan pemasok, sehingga transaksi dan produksi berjalan lancar.

Banyak negara ASEAN juga telah menerapkan kawasan industri untuk mendukung kondisi ekonomi mereka. Pemerintah Thailand, membentuk kluster industri sejak tahun 1972 (Ditkaew dan Pitchayatheeranart, 2019). Selain sektor industri, kluster industri berkontribusi terhadap pertumbuhan usaha kecil dan menengah di Thailand (Santipolvt & Mali, 2015 juga Turner et al., 2016). Di Vietnam sektor manufaktur, Gokan et al. (2019) mengklaim bahwa kluster industri menyebabkan limpahan produktivitas di antara perusahaan yang bergabung. Pengembangan daerah bahkan berdampak positif pada proses inovasi di UKM Vietnam (Le, 2018). Selain di ASEAN, di Korea Selatan industrialisasi menciptakan dan memperbaharui kawasan industri di beberapa kawasan (Hassink et al., 2018).

Peranan kawasan industri secara langsung berdampak positif bagi perekonomian daerah Indonesia. Napitupulu & Nugroho (2016) menyatakan adanya peningkatan ekonomi warga dan peningkatan aktivitas perdagangan karena sektor industri yang lebih tinggi, seperti di Batam. Juga di Karawang, pertumbuhan dari sektor manufaktur dan meningkatkan pendapatan langsung masyarakat (Atthahara & Rizki, 2019). Kawasan peruntukan industri juga mendorong potensi komoditas dan produk daerah. Anam & Setyawan (2019) menyatakan bahwa di Jepara kawasan peruntukan industri mendorong inovasi produk dan akses pasar ekspor produk kayu dan industri kerajinan rotan.

Berdasarkan faktor tersebut, banyak yang percaya bahwa kawasan peruntukan industri mendorong sektor industri dengan memberikan tingkat produktivitas yang lebih tinggi (Nazarczuk, 2017). Selain tingkat produktivitas, kawasan industri juga berkontribusi dalam meningkatkan nilai tambah, efisiensi, dan pendapatan ekonomi kawasan. Pada akhirnya, semua manfaat ini mendorong industri pengolahan untuk

percepatan industrialisasi (Lee et al, 2017; Winardi et al, 2019).

Banyak yang percaya bahwa kawasan peruntukan industri dapat mendorong sektor industri dengan memberikan tingkat produktivitas yang lebih tinggi (Hashino & Otsuka, 2013; Santipolvt & Mali, 2015; Nazarczuk, 2017). Santipolvt & Mali (2015) menyatakan produktivitas yang lebih tinggi diperoleh dari omset yang lebih tinggi dan biaya produksi yang lebih rendah serta didukung oleh limpahan teknologi dan pengetahuan yang mengarah pada inovasi. Hashino & Otsuka (2013) menambahkan bahwa tingkat produktivitas kluster akan meningkat dengan syarat perusahaan baru harus memiliki teknologi baru yang berbeda dengan perusahaan incumbent.

Atthahara & Rizki (2019) percaya bahwa pengembangan kawasan peruntukan industri dapat menjadi pusat pertumbuhan bagi Indonesia. Sabri et al. (2018) diidentifikasi dalam kasus Indonesia, berada di kawasan industri mendorong perusahaan untuk melakukan lebih banyak ekspor karena banyak insentif. Nazarczuk & Uminski (2018b) menyatakan bahwa kawasan industri mendorong peningkatan ekspor mencapai sekitar 24%.

III. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode pengembangan (*development method*) yaitu memberikan gambaran yang lebih detail terkait pelaksanaan pemanfaatan ruang terkait dengan RTRW. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis penggunaan lahan eksisting, pola ruang RTRW, kesesuaian pewilayahan (zonasi) dengan kebijakan pembangunan Kabuapten Kuantan Singingi. Pewilayahan dianalisis dari penetapan suatu area, baik kawasan dasar maupun kawasan lainnya yang perlu ditangani secara spesifik. Untuk kemudian dirinci dalam penentuan spesifikasi masing-masing kawasan. Pewilayahan zona ini menyesuaikan sifat kawasan yang dianalisis, dan fungsi-fungsinya diuraikan

mengikuti klasifikasi yang sudah ditentukan oleh pedoman pewilayahan.

Tahap pertama dari studi ini adalah mengidentifikasi faktor yang berpengaruh terhadap penentuan wilayah industri pendukung pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Faktor-faktor tersebut ditentukan mengikuti hasil telaah literatur yang selanjutnya dikonfirmasi kepada pemangku kepentingan terkait menggunakan teknik content analysis. Selanjutnya, menggunakan analisis deskriptif untuk dalam menyusun kriteria wilayah industri di Kabupaten Kuantan Singingi. Analisis ini menggunakan sumber-sumber seperti standar dan peraturan, literatur, dan peta yang relevan untuk mendeskripsikan zona.

IV. ANALISA DATA

Luas Kabupaten Kuantan Singingi menurut UU Nomor 53 Tahun 1999± 7.656,03 Km² (8,82% dari luas Provinsi Riau). Namun di dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Riau ± 5.272,74 Km². Kabupaten Kuantan Singingi meliputi 15 kecamatan, yaitu Kuantan Mudik, Hulu Kuantan, Gunung Toar, Pucuk Rantau, Singingi, Singingi Hilir, Kuantan Tengah, Sentajo Raya, Benai, Kuantan Hilir, Pangean, Logas Tanah Darat, Kuantan Hilir Seberang, Cerenti, dan Inuman.

Secara administrasi Kabupaten Kuantan Singingi beribukota di Kecamatan Kuantan Tengah yang juga menjadi pusat wilayah dan perdagangan, dengan ketersediaan infrastuktur sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Akan tetapi pada kenyataannya dapat dilihat bahwa terdapat pusat regional semu selain Kecamatan Kuantan Tengah yaitu Kecamatan Singingi. Tidak dinafikan bahwa Kecamatan Singingi sebagai wilayah yang tumbuh laju berbanding dibandingkan wilayah-wilayah lain di Kuantan Singingi.

Karakter dan ciri khas Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

1. Pola ruang eksisting Kabupaten Kuantan Singingi, dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu: (a) Kawasan Hutan Lindung Sentajo dan Hutan Lindung Bukit Batabuh, sedangkan hutan suaka margasatwa terdapat di Bukit Rimbang dan Bukit Baling; (b) Kawasan lahan perkebunan (Up Land) berupa karet, kelapa sawit dan kakao, hampir merata di semua wilayah Kuantan Singingi; dan (c) Kawasan perkotaan Teluk Kuantan dan sekitarnya di Kecamatan Kuantan Tengah dan Kecamatan Sentajo Raya;
2. Struktur ruang di Kabupaten Kuantan Singingi tergambar sebagai berikut: (a) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah dengan fungsi pusat administrasi pemerintahan, industri, perdagangan dan jasa; (b) Benai sebagai PKL diarahkan menjadi pendukung kegiatan sosial, ekonomi tempatan; Melayani beberapa kecamatan sebagai pelayanan pemerintahan lokal merangkumi kegiatan sosial, perdagangan dan jasa; dan permukiman kota; (c) Ibukota kecamatan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu Lubuk Jambi (Kecamatan Kuantan Mudik), Muara Lembu (Kecamatan Singingi), Koto Baru (Kecamatan Singingi Hilir), Baserah (Kecamatan Kuantan Hilir), dan Cerenti (Kecamatan Cerenti), sebagai Pusat pelayanan pemerintahan lokal yang meliputi pelayanan kegiatan sosial, perdagangan dan jasa; (d) Ibukota kecamatan lainnya yaitu Lubuk Ambacang (Kecamatan Hulu Kuantan), Kampung Baru (Kecamatan Gunung Toar), Pangean (Kecamatan Pangean), Inuman (Kecamatan Inuman), Perhentian Luas (Kecamatan Logas Tanah Darat), Koto Sentajo (Kecamatan Sentajo Raya), Koto Rajo

(Kecamatan Kuantan Hilir Seberang) dan Pangkalan (Kecamatan Pucuk Rantau) berpotensi untuk menjadi PPK (Pusat Pelayanan Kawasan), merupakan pusat pemerintahan lokal yang melayani kegiatan lokal, pelayanan untuk beberapa desa/kelurahan; (e) Distribusi infrastruktur utama seiring dengan perkembangan masing-masing IKK, yaitu sarana kesehatan (puskesmas), pendidikan, pasar tradisional. Sarana skala kabupaten yang melayani beberapa kecamatan seperti RSUD, Telkom, PLN (Cabang), PDAM, perbankan, toko swalayan (mini market) terdapat di Kuantan Tengah, Lubuk Jambi, Benai, Baserah dan Cerenti.

Tujuan pola keruangan Kabupaten Kuantan Singingi adalah “Mewujudkan Kabupaten Kuantan Singingi sebagai pusat agroindustri dan agrobisnis yang mendukung pembangunan ekonomi dan pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”. Tujuan fungsi pewilayahan industri dalam tata ruang untuk mempercepat proses industrialisasi yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dan efisiensi produk dengan memanfaatkan bahan baku lokal.

Pewilayahan Industri

Di Kabupaten Kuantan Singingi, industri yang berkembang merupakan industri kecil dan menengah. Industri di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sektor yang menunjang dalam system agribisnis, sebagian besar industri merupakan industri yang mendukung pengolahan hasil perkebunan dan kehutanan seperti hasil produksi karet, kelapa sawit, dan kayu. Industri skala menengah ke atas perlu dikembangkan dalam sistem kemitraan dengan skala menengah dan kecil atau rumah tangga.

Prasarana penyokong pemasaran keluaran industri mesti dipertimbangkan. Pewilayahan industri seharusnya berada pada sekitar 5 - 8 km dari pasar atau tempat

pemasaran (Drestalita dan Rahmawati, 2015). Pewilayahan yang berada kurang 5 km dari pasar dianggap sesuai sebagai kawasan peruntukan industri. Kawasan yang berada pada radius 5 - 8 km dari pasar dianggap cukup sesuai. Sedangkan kawasan peruntukan industri berada di luar 8 km dari lokasi pemasaran dianggap kurang sesuai menjadi wilayah industri.

Guna lahan industri di Kabupaten Kuantan Singingi terbagi menjadi 2 (dua), yaitu kawasan industri kecil dan kawasan industri besar. Kawasan industri sebagai tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan infrastruktur penunjang dibangun dan dikelola oleh badan pengelola yang memiliki izin usaha kawasan industri. Sedangkan peruntukan industri adalah lahan yang diperuntukan untuk kegiatan industri dalam skala kecil. Peruntukan luas wilayah industri di Kabupaten Kuantan Singingi seluas 52,56 hektar yang terletak di beberapa kecamatan. Luas Kawasan peruntukan industri tersebut akan digunakan untuk pengembangan industri kecil dan menengah.

Perkebunan Sawit merangkumi wilayah Singingi Hilir, Kuantan Tengah, Kuantan Mudik, dan Sentajo Raya. Wilayah yang memiliki hasil terbesar adalah:

1. Wilayah Kuantan Mudik dan Pucuk Rantau yang dikelola oleh perkebunan dan masyarakat tempatan melalui swadaya murni, swadaya berbantuan, UPP-D, PIR dan PBS.
2. Wilayah Singingi Hilir dan Kecamatan Sentajo Raya dikelola masyarakat melalui swadaya murni, swadaya berbantuan dan lainnya, di mana penduduknya adalah oleh desa ekstrasmigrasi.
3. Wilayah Kuantan Tengah umumnya adalah kebun masyarakat tempatan dan perkebunan swasta.

Dampak kebijakan pewilayahan industri banyak dampak positif di sisi ekonomi seperti ekonomi wilayah tumbuh pesat, masyarakat bertransformasi menuju

masyarakat industrialisasi, peningkatan taraf penghidupan dan lainnya. Tetapi, dibalik itu semua menyimpan dampak-dampak negatif di bidang kependudukan, sosial budaya, dan lingkungan (Atthahara & Rizki, 2019). Isu-isu strategis yang berkembang berkenaan dengan pewilayahan di Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

1. Alih fungsi lahan;
2. Pola pemanfaatan ruang belum optimal, adanya kegiatan tambang ilegal dan rendahnya kesadaran masyarakat pembangunan berkelanjutan;
3. Terbatasnya infrastruktur menyebabkan pusat-pusat pertumbuhan belum memicu pembangunan wilayah sekitarnya (hinterland);
4. Terdapat potensi bencana alam yaitu banjir dan longsor, sehingga dibutuhkan kehati-hatian dalam pengembangan kawasan budidaya;
5. Pemanfaatan sumberdaya alam potensial kurang optimal karena bersempadan dengan hutan lindung.

Penyebaran Industri

Industri pengolahan menjadi sector tertinggi pertama dari tiga sector yang mendominasi struktur produk domestik domestik bruto (PDRB) Kabupaten Kuantan Singingi. Perkembangan kontribusi PDRB harga berlaku sector Industri pengolahan terhadap PDRB keseluruhan selama periode 2016-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 0,86% atau naik dari 26,88% pada tahun 2016 menjadi 27,81% pada tahun 2020. Sementara pertumbuhan kontribusi PDRB harga konstan sector Industri pengolahan terhadap PDRB harga konstan keseluruhan selama tahun 2016-2020 tumbuh sebesar 1,39% atau naik dari 29,61% pada tahun 2016 menjadi 31,28% tahun 2020. Peranan sector industri pengolahan terhadap perekonomian daerah sangat besar terutama berdasarkan harga konstan melebihi 30% pada tahun 2020. Angka ini menunjukkan bahwa adanya kenaikan jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Meningkatkan barang dan jasa yang

dhasilkan memperbesar jumlah tenaga kerja yang terserap. Kontribusi sector industri pengolahan terus tumbuh dan semakin penting dalam ekonomi wilayah Kuantan Singingi. Demikian pula dengan share industri pengolahan terus mengalami kenaikan. Industri di Kuantan Singingi yang potensial adalah industri minyak sawit, industri lempengan karet, industri perabotan, industri pengolahan makanan tradisional, dan industri rumah tangga.

Mengikuti data Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi terdapat 28 jenis industri serta beberapa perusahaan yang bergerak di bidang industri perkebunan. Kawasan peruntukan industri pada Kabupaten Kuantan Singingi diarahkan pada Kecamatan Kuantan Tengah dengan luas 52,56 Ha. Tahun 2020 terdapat 855 perusahaan industri, dengan nilai investasi industri sebesar 25,08 miliar rupiah. Kecamatan yang memiliki perusahaan industri terbanyak adalah Kuantan Tengah, sebanyak 173 perusahaan. Sementara itu, kecamatan yang memiliki perusahaan industri paling sedikit adalah Pucuk Rantau, sebanyak 9 perusahaan. Jumlah pekerja industri pada tahun 2020 adalah 2.582 orang, naik 3,8 persen dibandingkan tahun 2019.

Penggolongan perusahaan industri pengolahan didasarkan kepada banyaknya tenaga kerja yang bekerja. Pembangunan sector industri pengolahan besar dan menengah (IBM) di Kabupaten Kuantan Singingi berpusat pada sector pertanian, dimana Industri pengolahan hasil pertanian yaitu industri pengolahan hasil kelapa sawit dan pohon karet. Terdapat 22 (dua puluh) industri besar dan menengah yang tersebar pada kecamatan-kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel 1. Perusahaan Industri Besar dan Menengah Mengikuti Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020

No	Kecamatan	Lokasi	Nama Perusahaan	Kelas
1	Singingi Hilir	Bumi Mulya	Citra Riau Sarana, PT <PKS1>	B
		Tanjung Pauh	Kebun Pantai Raja, PT	B
		Tanjung Pauh	Mustika Agro Sari, PT	B
		Beringin Jaya	Surya Agrolika Reksa I,PT	B
		Sungai Buluh	Wanasari Nusantara,PT	B
		Tanjung Pauh	Inti Indosawit Subur, PT	M
2	Singingi	Koto Baru	Surya Agrolika Reksa II, PT	M
		Logas Hilir	Andalas Agrolestari, PT	B
		Sungai Baewang	Sinar Utama Nabati, PT	B
3	Kuantan Tengah	Kebun Lado	Duta Mentari Raya, PT	M
		Jake	Asia Sawit Makmur Jaya, PT	B
4	Sentajo Raya	Jake	Usaha Kita Makmur, PT	B
		Muara Langsung	Citra Riau Sarana, PT <PKS2>	B
5	Kuantan Mudik	Jalur Patah	Sumber Graha Sejahtera, PT	B
		Pantai	Tri Bakti Sari Mas 1,PT	B
6	Hulu Kuantan	Serosa	Tamora Agro Lestari, PT	B
7	Inuman	Lebuh Lurus	Gemilang Sawit Lestari	B
8	Benai	Banjar Benai	Duta Palma Nusantara, PT	M
9	Cerenti	Pesingkaian	Wana Jingga Timur, PT	M
10	Kuantan Hilir Seberang	Rawang Oguang	Cerenti Subur, PT	M
11	Logas Tanah Darat	Sidodadi	Citra Riau Sarana, PT <PKS3>	M
12	Pucuk Rantau	Ibul	Tri Bakti Sarimas 2, PT	M

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi, 2021

Melalui Tabel 1 dapat kita lihat tidak semua wilayah di Kabupaten Kuantan Singingi memiliki Industri besar dan menengah. Perusahaan IBM terbanyak berada di Kecamatan Singingi Hilir yakni sebanyak 6 perusahaan. Hal ini dikarenakan lahan kelapa sawit dan/atau karet terbesar berada di Kecamatan Singingi Hilir sehingga perusahaan mendirikan industri pengolahan di wilayah strategis dekat dengan lahan kelapa sawit dan/atau karet (bahan bakunya).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh CORE Indonesia tahun 2020, Kabupaten Kuantan Singingi memiliki 5 (lima) sektor unggulan yaitu:

1. Minyak Goreng Kelapa Sawit
2. Kawasan Pariwisata
3. Karet Remah (Crumb Rubber)
4. Industri Batik
5. Industri Barang dari Karet Keperluan Rumah Tangga

Walaupun kondisi Kabupaten Kuantan Singingi sampai saat ini belum memiliki Dokumen Rencana Pembangunan

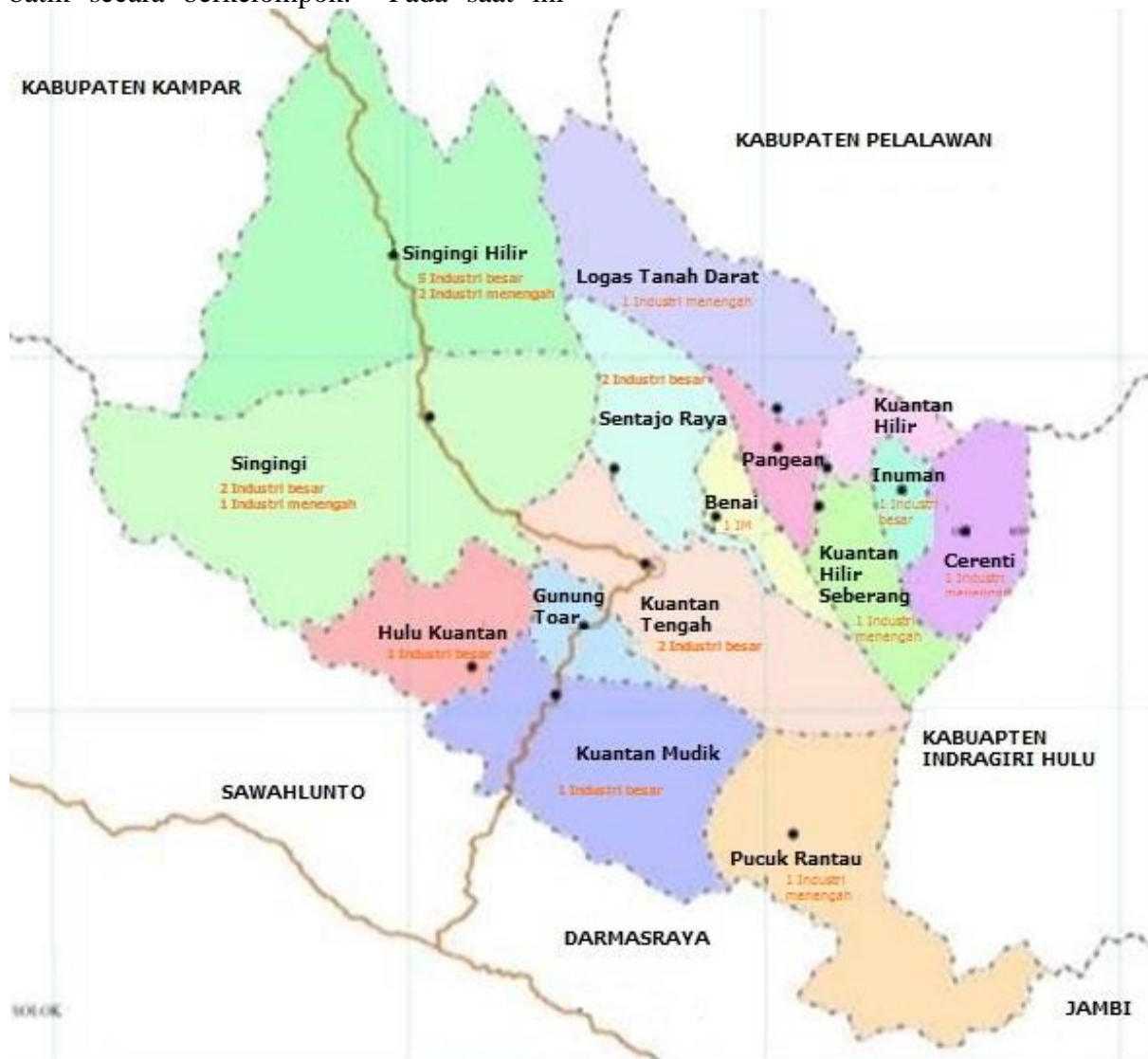
Industri Kabupaten, namun 5 (lima) sektor di atas akan dikembangkan guna menggesa transformasi ekonomi dari sektor ekstraktif menuju industri pengolahan dan jasa yang berkelanjutan secara bertahap.

Merujuk kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Riau Tahun 2018-2038, terdapat satu Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sentra Kerupuk Ubi (berdasarkan data tahun 2016) yang terletak di Teluk Kuantan.

Seiring berjalan waktu sampai saat ini, usaha kerupuk kurang berkembang, dikalahkan oleh maraknya pertumbuhan industri batik. Pada saat ini sudah terdapat sekitar 180 orang pembatik dengan motif khas Kuansing yang tersebar di beberapa kecamatan yaitu Gunung Toar, Singingi, Logas Tanah Darat dan Kuantan Tengah. Namun pengrajin batik terbanyak berada di Kecamatan Gunung Toar, dimana masing-

masing desa sudah memiliki anggota minimal 5 orang pembatik yang membuat batik secara berkelompok. Pada saat ini

sudah ada 4 kelompok yang memiliki anggota lebih dari 10 orang pembatik.



Gambar 1

Sebaran Industri Besar dan Menengah

Banyaknya pembatik ini berada di Kecamatan Gunung Toar, maka dalam perencanaan akan di bentuk Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) batik di Kecamatan Gunung Toar, di mana pemerintah sudah membebaskan lahan untuk SIKIM batik tersebut, sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah, karena ini menjadi salah satu syarat untuk pembentukan SIKIM.

Adapun industri kecil yang dianggap memiliki potensi untuk dikembangkan di Kabupaten Kuantan Singingi antara lain:

1. Industri kerajinan tenun (batik Kuansing)

Batik Kuansing merupakan batik dengan motif-motif yang mengedepankan ciri khas Kuansing. Produksi batik di Kuantan Singingi masih terbatas. Kondisi ini disebabkan oleh minimnya modal dan peralatan kerja, sehingga memicu harga yang cukup tinggi. Untuk saat ini salah satu rencana Pemkab Kuansing untuk mengembangkan usaha batik di Kuansing adalah mewacanakan memakai batik Kuansing bagi ASN pada hari tertentu.

2. Industri pengolahan sagu (kerupuk sagu)

Kerupuk sagu merupakan salah satu cemilan khas Kuantan Singingi bahkan selalu dijadikan oleh-oleh bagi mereka yang berada di luar kabupaten Kuantan Singingi. Kendala dalam pengolahan kerupuk sagu masih terbatasnya ketersediaan bahan baku sagu sehingga masih memasok dari daerah lain.

3. Industri pengolahan ikan (ikan salai)

Potensi perikanan di Kabupaten Kuantan Singingi cukup besar, mulai dari perikanan tangkap hingga perikanan budidaya. Melihat peluang tersebut maka Kuantan Singingi mengembangkan usaha pengolahan ikan salai karena dinilai mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun kendala saat ini yang dihadapi banyaknya ikan budidaya yang mati sebelum waktunya panen, sehingga mengakibatkan keterbatasan ketersediaan bahan baku untuk produk ikan salai.

4. Industri pengolahan kelapa sawit

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor yang menggerakkan perekonomian di Kuantan Singingi. Ketersediaan bahan baku sawit cukup banyak, akan tetapi industri pengolahan masih relatif sedikit, padahal pasarnya cukup menjanjikan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pewilayahan industri berfungsi untuk mempercepat proses industrialisasi yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dan efisiensi produk dengan memanfaatkan bahan baku lokal. Industri di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sektor yang menunjang dalam system agribisnis, sebagian besar industri merupakan industri yang mendukung pengolahan hasil perkebunan dan kehutanan seperti hasil produksi karet, kelapa sawit, dan kayu.

Guna lahan industri di Kabupaten Kuantan Singingi terbagi menjadi 2 (dua), yaitu kawasan industri kecil dan kawasan industri besar. Peruntukan luas wilayah industri di Kabupaten Kuantan Singingi seluas 52,56 hektar yang terletak di beberapa kecamatan, yang akan digunakan untuk

pengembangan industri kecil dan menengah. Industri pengolahan terhadap PDRB harga konstan keseluruhan selama tahun 2016-2020 tumbuh sebesar 1,39% atau naik dari 29,61% pada tahun 2016 menjadi 31,28% tahun 2020. Tahun 2020 terdapat 855 perusahaan industri, dengan nilai investasi industri sebesar 25,08 miliar rupiah. Kecamatan yang memiliki perusahaan industri terbanyak adalah Kuantan Tengah, sebanyak 173 perusahaan. Perusahaan industri besar dan menengah terbanyak berada di Kecamatan Singingi Hilir yakni sebanyak 6 perusahaan.

Saran

Industri kecil yang memungkinkan masuk ke sentra industri kecil dan industri menengah (SIKIM) adalah industri kerajinan tenun (batik Kuansing), kerupuk sagu, ikan salai, dan pengolahan hasil kelapa sawit. Peluang industri kecil di Kuantan Singingi perlu dikembangkan dengan pasokan bahan baku. Industri besar dan menengah perlu di tempatkan di kawasan peruntukan industri untuk memastikan adanya keterkaitan pemanfaatan lahan dengan pewilayahan industri di Kabupaten Kuantan Singingi.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anam, A. K. & Setyawan, M. (2019). Strategi pengembangan produk unggulan daerah berbasis klaster pada sentra kawasan industri rotan di Kabupaten Jepara. *Management Development and Applied Research Journal*, 1 (2), 1-8. Retrieved from <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/mandar/article/view/368/185>
- Antonietti, R., & Cainelli, G. (2011). Spatial Agglomeration in a Structural Model of Innovation, Productivity, and Export is a Firm-Level Analysis. *The Annals of Regional Science*, 46 (3), 577-600. <https://doi.org/10.1007/s00168-009-0359-7>

- Aritenang, A. F., & Chandramidi, A. N. (2020). The Impact of Special Economic Zones and Government Intervention on Firm Productivity: The Case of Batam, Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56 (2), 225-249. <https://doi.org/10.1080/00074918.2019.1643005>
- Atthahara, H. & Rizki, M. F. (2019). Analisis tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Dampak Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri bagi Masyarakat Sekitar di Kabupaten Karawang. *The Indonesian Journal of Politics and Policy*, 1 (1), 9-21. Retrieved from <https://journal.unsika.ac.id/index.php/IJPP/article/view/1642/1297>
- Badr, K., Rizk, R., & Zaki, C. (2019). Firm Productivity and Agglomeration Economies: Evidence from Egyptian Data. *Applied Economics*, 51 (1), 5528-5544. <https://doi.org/10.1080/00036846.2019.1613506>
- Budiyanto, P., Saefuddin, A., dan Putri, E.I.K. (2015). Sustainability analysis of PT East Jakarta Industrial Park in realizing environmental industrial park. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 5 (2), 199-209. <https://doi.org/10.19081/jpsl.2015.5.2.199>
- Cahyanto, A.D. (2016). Pengembangan kebijakan sistem manajemen mutu dan lingkungan berkelanjutan (Studi kasus Kawasan Industri Jababeka Cikarang Bekasi). *Journal of Environment Engineering and Waste Management*, 1 (1), 1-14. Retrieved from <http://e-journal.president.ac.id/presunivojs/index.php/JENV/article/view/37/40>
- Cieřlik, A., Gauger, I., & Michaek, J. J. (2017). Agglomeration externalities, competition, and productivity: Empirical evidence from Ukraine firms. *The Annals of Regional Science*, 60 (1), 213-233. <https://doi.org/10.1007/s00168-017-0851-4>
- Daddi, T., Iraldo, F., Frey, M., Gallo, P., Gianfrate, V. (2015). Regional policies and eco-industrial development: the voluntary environmental certification scheme of the eco-industrial parks in Tuscany (Italy). *Journal of Cleaner Production*, 114, 62-70. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.04.060>
- Drestalita, N.D. & Rahmawati, D. (2015). Kriteria zona industri pendukung pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Tuban. *Jurnal Teknik ITS*, 4 (2), C133 – C 138. <https://doi.org/10.12962/j23373539.v4i2.10933>
- Fafchamps, M., & El Hamine, S. (2017). Firm productivity, wages, and agglomeration externalities. *Research in Economics*, 71 (2), 291-305. <https://doi.org/10.1016/j.rie.2016.12.003>
- Galliano, D., Magrini, M.-B., & Triboulet, P. (2015). Marshall's versus Jacobs' externalities in firm innovation performance: The Case of French Industry. *Regional Studies*, 49 (11), 1840-1858. <https://doi.org/10.1080/00343404.2014.950561>
- Gianneccchini, P., Taylor, I. (2017). The Eastern Industrial Zone in Ethiopia: Catalyst for Development? *Geoforum*, 88, 28-35. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2017.11.003>
- Gokan, T., Kuroiwa, I., Nakajima, K. (2019). Agglomeration economies in Vietnam: A firm-level analysis. *Journal of Asian Economics*, 62, 52-64.

- <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2019.03.002>
- Hadiwijoyo, Purwanto, R., Sudarto, P.H. (2013). Innovative green technology for sustainable industrial estate development. *International Journal of Renewable Energy Development*, 2 (1), 53-58. <https://doi.org/10.14710/ijred.2.1.53-58>
- Hashino, T. & Otsuka, K. (2013). Cluster-based industrial development in contemporary developing countries and modern Japanese economic history. *Journal of the Japanese and International Economies*, 30, 19-32. <https://doi.org/10.1016/j.jjie.2013.09.001>
- Hassink, R., Hu, X., Shin, D., Yamamura, S., Gong, H. (2018). The restructuring of old industrial areas in East Asia. *Area Development and Policy*, 3 (2): 185-202. <https://doi.org/10.1080/23792949.2017.1413405>
- Khoirunurrofik. (2018). Local economic structure, productivity growth, and industry life cycle: Evidence from Indonesia. *Asia-Pacific Journal of Regional Science*, 2 (2), 453-475. <https://doi.org/10.1007/s41685-018-0072-6>
- Knoben, J., Arikan, A., van Oort, F., Raspe, O. (2016). Agglomeration and firm performance: One firm's medicine is another firm's poison. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 48 (1), 132-153. <https://doi.org/10.1177/0308518X15602898>
- Kodrat, K.F. (2011). Analisis sistem pengembangan kawasan industri terpadu (Studi kasus di PT.Kawasan Industri Medan). *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 18 (2), 146 – 158. <https://doi.org/10.22146/jml.18819>
- Le, V. A. (2018). Does agglomeration account for process innovation in Vietnamese small and medium enterprises? *Economics Honors Projects*, 83. Retrieved from https://digitalcommons.maclester.edu/economics_honors_projects/83/
- Lee, S. J., Lin, G. T. R., His, P. H. (2017). Industrial cluster development and its contribution to economic growth in Taiwan – Hsinchu Science and Industrial Park (HSIP). *Journal of Scientific & Industrial Research*, 76, 273 - 278. Retrieved from <http://nopr.niscair.res.in/handle/123456789/41604>
- Li, D., Lu, Y., & Wu, M. (2012). Industrial agglomeration and firm size: Evidence from China. *Regional Science and Urban Economics*, 42 (1-2), 135-143. <https://doi.org/10.1016/j.regsciurbe.2011.07.003>
- Napitupulu, B. K, Nugroho, P. (2016). Pengaruh aktivitas industri terhadap peningkatan ekonomi penduduk dan perkembangan perdagangan dan jasa di Kota Batam. *Teknik Perencanaan Wilayah Kota*, 5 (1), 1-9. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/10619>
- Narula, R. & Zhan, J.X. (2019). Using special economic zones to facilitate development: Policy implications. *Transnational Corporations*, 26 (2), 1-25. <https://doi.org/10.18356/72e19b3c-en>
- Nazarczuk, J. M. & Uminski, S. (2018). The impact of special economic zones on export behaviour: Evidence from Polish firm-level data. *Ekonomie*, 21 (3), 4-22. <https://doi.org/10.15240/tul/001/2018-3-001>

- Nazarczuk, J. M. (2017). Do operations in SEZs improve a firm's productivity? Evidence from Poland. *New Trends and Issues. Proceedings on Humanities and Social Sciences* 4 (10), 256–264. <https://doi.org/10.18844/prosoc.v4i10.3096>
- Sabri, M., D Nachrowi, N., Soetjipto, W., & Panennungi, M. A. (2018). Industrial Estate and Export Decision of Manufacturing Firms in Indonesia. *Malaysian Journal of Economic Studies*, 55 (2), 189-207. <https://doi.org/10.22452/MJES.vol55no2.3>.
- Santipolvut, S. & Mali, K. (2015). Industrial cluster development in Thailand: There is still a long road ahead. *Journal of Applied Economic Sciences*, 10 (38). 1259-1287. Retrieved from <https://www.cceol.com/search/journal-detail?id=1011>
- Suharyani, S., & Mahi, B. R. (2018). Aglomerasi dan Perbedaan Produktivitas Perusahaan di Dalam dan di Luar Kawasan Berikat. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 18 (2), 111-128. <https://doi.org/10.20961/jiep.v18i2.24970>
- Sujiman (2016). Kawasan Industri Berbasis Ekologi. *AIU Lum Sains dan Teknologi*, 1 (2), 115- 122. <http://dx.doi.org/10.31602/ajst.v1i2.446.g399>
- Susanty, A., Puspitasari, NB., dan Sipayung, D.L. (2015). Usulan pengembangan eco industrial park dengan konsep waste exchange. (Studi kasus: Kawasan Industri Candi Semarang). *Prosiding Seminar Nasional IENACO – 2015*. Retrieved from <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/5789>
- Turner, M., Sermcheep, S., Anantasirijikat, S., Srisangnam, P. (2016). Small and medium-sized enterprises in Thailand: Government policy and economic development. *Asia Pacific Journal of Public Administration*, 38 (4): 251-269. <https://doi.org/10.1080/23276665.2016.1256545>
- United Nations Industrial Development Organization. (2012). Conference Report on Europe and Central Asia Regional. *Conference on Industrial Parks: As A Tool To Foster Local Industrial Development*, Baku, Azerbaijan, April 17-18, 2012. UNIDO Press.
- Wardani, K., & Yudhistira, M. H. (2020). Konsentrasi Spasial, Aglomerasi dan Produktivitas Perusahaan Industri Manufaktur Indonesia. *Jurnal Manajemen Industri dan Logistik*, 4 (2), 146-156. <https://doi.org/10.30988/jmil.v4i2.544>
- Winardi, W., Priyarsono, D. S., Siregar, H., Kustanto, H. (2017). Kinerja sektor industri manufaktur Provinsi Jawa Barat berdasarkan lokasi di dalam dan di luar kawasan industri. *Journal of Technology Management*, 16 (3), 241-257. [10.12695/jmt.2017.16.3.2](https://doi.org/10.12695/jmt.2017.16.3.2)
[10.12695/jmt.2017.16.3.2](https://doi.org/10.12695/jmt.2017.16.3.2)
- Winardi. Priyarsono, D. S., Siregar, H., Kustanto, H. (2019). Peranan kawasan industri dalam mengatasi gejala deindustrialisasi. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 19 (1), 84-95. <https://doi.org/10.21002/jepi.v19i1.834>
- Wixe, S. (2015). The impact of spatial externalities: Skills, education, and plant productivity. *Regional Studies*, 49 (12), 2053-2069. <https://doi.org/10.1080/00343404.2014.891729>